

Mengelola Berbagai Stakeholder Pendidikan

Sumiati¹, Muhammad Syaifudin²

^{1,2}Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, UIN Syarif Kasim Riau

e-mail: sumiatihanafi60@gmail.com¹, muhammadsyaifudin74@gmail.com²

Abstrak

Kualitas pendidikan bermula dari manajemen pengelolaan yang solid. Tingkat kualitas yang tinggi sulit dicapai jika manajemen pengelolaannya tidak berlandaskan pada prosedur tatakelola yang solid juga. Manajemen strategis pendidikan menjadi kunci esensial dalam membangun sistem pendidikan yang responsif dan sesuai dengan perubahan zaman yang terus berlangsung. Pengelolaan berbagai stakeholder Pendidikan juga mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan mutu Pendidikan. Karena dengan manajemen yang baik di segala lini Pendidikan akan memberikan dampak positif bagi dunia Pendidikan. Metode penelitian pada artikel ini menggunakan metode riset kepustakaan (Library Research) metode penelitian ini berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dokumentasi dan teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis kritis yang dimana analisis ini sifatnya kritis umumnya beranjak dari pandangan atau nilai-nilai tertentu yang diyakini oleh peneliti terkait dalam permasalahan peningkatan mutu pendidikan yang melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti teliti. Hasil penelitian ini adalah Dari paparan tulisan di atas dapat disimpulkan bahwa Stakeholder adalah pemegang atau pemangku kepentingan. Dalam manajemen sebuah pendidikan atau lembaga pendidikan Stakeholder adalah sebuah indikator untuk menentukan mutu dan atau layanan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan memiliki berbagai macam Stakeholder, maka dalam pemetaan atau pembagiannya akan dikenal Stakeholder primer, sekunder, dan tersier. keberhasilan pendidikan tidak akan terjadi tanpa keterlibatan ketiga stakeholder pendidikan: sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Setelah melakukan pemetaan terhadap stakeholder, maka akan ditemukan komponen-komponen penyusun sehingga stakeholder menjadi satu kesatuan utuh yang saling bersinergi.

Kata kunci: *Mengelola, Stakeholder, Pendidikan*

Abstract

Quality education starts from solid management. A high level of quality is difficult to achieve if management is not also based on solid governance procedures. Educational strategic management is an essential key in building an education system that is responsive and in line with ongoing changes in time. Management of various education stakeholders also has a very important role in improving the quality of education. Because good management in all lines of education will have a positive impact on the world of education. The research method in this article uses the library research method (Library Research). This research method is concerned with library data collection methods. The data collection technique in this research uses documentation and techniques. This research data analysis uses critical analysis, where this analysis is critical in nature, generally starting from certain views or values believed by researchers related to the problem of improving the quality of education through documents related to the problem the researcher is studying. The results of this research are: From the explanation of the article above it can be concluded that Stakeholders are holders or stakeholders. In the management of an education or educational institution, stakeholders are an indicator for determining the quality and/or service of an educational institution. Educational institutions have various kinds of stakeholders, so in mapping or dividing them, primary,

secondary and tertiary stakeholders will be identified. Educational success will not occur without the involvement of the three educational stakeholders: schools, government and society. After carrying out mapping of stakeholders, the constituent components will be found so that the stakeholders become a unified whole that synergizes with each other.

Keywords : *Managing, Stakeholders, Education*

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi pasti memberikan dampak bagi dunia Pendidikan. Pengelolaan Lembaga Pendidikan dengan baik sebagai respon terhadap perkembangan zaman dan teknologi menjadi hal yang krusial untuk diperhatikan. Pengelolaan segala hal yang strategis dalam Lembaga Pendidikan secara baik akan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan mutu sebuah Lembaga Pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu bentuk perwujudan kebudayaan manusia yang dinamis dan sarat perkembangan. Karena itu, perubahan atau perkembangan pendidikan adalah hal yang memang seharusnya terjadi sejalan dengan perubahan budaya kehidupan. Perubahan dalam arti perbaikan pendidikan pada semua tingkat dan pada setiap bidang keilmuan terus menerus dilakukan sebagai antisipasi kepentingan masa depan. Organisasi beroperasi dalam jaringan sistematis yang saling terkait dan berdampak satu sama lain. Untuk menjaga kelangsungan hidupnya, organisasi harus mampu mengidentifikasi dan mengendalikan berbagai informasi penting dalam lingkungannya yang strategis. (Akdon, 2009)

Tren perkembangan Lembaga Pendidikan di Indonesia sedang mengalami dinamika yang signifikan. Setiap tahun, jumlah Lembaga Pendidikan terus bertambah, mencerminkan meningkatnya tuntutan masyarakat akan pendidikan. Namun, pertumbuhan ini seharusnya tidak hanya terfokus pada kuantitas, tetapi juga pada peningkatan kualitas. Pendidikan memiliki peran krusial dalam membentuk masa depan individu, komunitas, serta dampaknya pada skala global. Oleh karena itu, manajemen pendidikan yang efektif dan strategis sangat penting untuk memastikan bahwa setiap orang dapat mengakses pendidikan yang memadai dan mampu mengoptimalkan potensi mereka secara penuh. Kualitas pendidikan bermula dari manajemen pengelolaan yang solid. Tingkat kualitas yang tinggi sulit dicapai jika manajemen pengelolaannya tidak berlandaskan pada prosedur tatakelola yang solid juga. Manajemen strategis pendidikan menjadi kunci esensial dalam membangun sistem pendidikan yang responsif dan sesuai dengan perubahan zaman yang terus berlangsung. Pengelolaan berbagai stakeholder Pendidikan juga mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan mutu Pendidikan. Karena dengan manajemen yang baik di segala lini Pendidikan akan memberikan dampak positif bagi dunia Pendidikan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode Library Research. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data dan informasi dari berbagai literatur dan dokumen. Metode Library Research ini diterapkan dengan pendekatan analisis deskriptif, di mana data dieksplorasi dengan menjelaskan informasi yang terkumpul sesuai dengan pengetahuan yang ada, tanpa usaha untuk membuat kesimpulan yang bersifat umum atau generalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi stakeholder pendidikan

Stakeholder pertama kali muncul dalam dunia bisnis, berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, stake yang merujuk pada dukungan atau kepentingan yang besar, dan holder yang merujuk pada pemegang. Dalam konteks ini, Stakeholder mengacu pada siapa pun yang memiliki kepentingan dalam suatu usaha. Mereka dapat berperan sebagai tokoh kunci atau orang-orang yang dihormati dalam masyarakat sekitar, seperti Kepala Desa/Lurah, Ketua RT, Ketua Adat, Ustadz/Kyai. Lebih lanjut, kelembagaan yang dianjurkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kemajuan pendidikan, menurut UU No 20

Tahun 2003, antara lain melalui pembentukan Dewan Pendidikan dan komite sekolah. Kepala dan anggota dari kedua lembaga ini dapat dianggap sebagai Stakeholder. Para ahli memiliki beragam pandangan terhadap konsep Stakeholder. Misalnya, Freeman mendefinisikan Stakeholder sebagai kelompok atau individu yang mampu mempengaruhi atau dipengaruhi dalam pencapaian tujuan tertentu. Sementara itu, menurut Biset, Stakeholder adalah individu dengan kepentingan atau perhatian pada suatu masalah. Identifikasi Stakeholder sering dilakukan dengan mempertimbangkan kekuatan dan kepentingan relatif mereka terhadap isu yang dihadapi, seperti yang dikemukakan oleh Freeman, atau dari sudut pandang posisi dan pengaruh yang dimiliki, seperti yang disarankan oleh Grimble dan Wellard. Stakeholder merupakan bagian dari lembaga yang disarankan untuk memajukan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan, termasuk dalam bentuk komite sekolah. (Muhaimin, 2010). Definisi lain dari Stakeholder adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan spesifik terhadap suatu entitas atau objek tertentu. Dalam konteks pendidikan, Stakeholder dapat dijelaskan sebagai individu atau kelompok yang tidak hanya memiliki kepentingan dalam lembaga pendidikan, tetapi juga memberikan dukungan terhadapnya. Dengan kata lain, Stakeholder dalam pendidikan merujuk pada orang-orang atau entitas yang memiliki kepentingan yang langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas pendidikan yang terjadi di sekolah.

Pemetaan stakeholder pendidikan

Jika dalam definisi sebelumnya disebut bahwa Stakeholder adalah pihak yang memiliki dan mendukung pendidikan atau lembaga pendidikan, maka perlu dilakukan pemetaan Stakeholder. Mengapa pemetaan ini penting? Dalam manajemen sebuah institusi pendidikan, Stakeholder menjadi penanda penting untuk mengevaluasi kualitas dan pelayanan lembaga pendidikan tersebut. Sebab lembaga pendidikan melibatkan beragam pihak dengan kepentingan yang berbeda, maka diperlukan pemetaan atau pengelompokan Stakeholder menjadi tiga kategori, yakni Stakeholder primer, sekunder, dan tersier :

a. *Stakeholder* utama (primer)

Stakeholder utama merupakan Stakeholder yang memiliki keterlibatan secara langsung dengan suatu kebijakan pendidikan. Mereka harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan. (Fattah, 2009)

b. *Stakeholder* pendukung (sekunder)

Stakeholder pendukung (sekunder) adalah pihak yang secara langsung terlibat dalam proses pendidikan dan bertindak untuk menerapkan kebijakan yang berasal dari stakeholder primer. Dalam kategori stakeholder ini, terdapat kepala sekolah, para pendidik dan tenaga kependidikan. Di lembaga pendidikan swasta, ada yayasan yang bertanggung jawab, dan yang terakhir adalah komite sekolah. (Muhaimin, 2010)

c. *Stakeholder* pelengkap (tersier)

Stakeholder tersier adalah pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam pembuatan atau pelaksanaan kebijakan pendidikan, namun memiliki hak untuk mengevaluasi kebijakan pendidikan dan menggunakan lulusan dari lembaga pendidikan tersebut. Mereka umumnya terdiri dari masyarakat yang menyediakan lapangan kerja atau orang-orang yang tertarik dengan lembaga pendidikan. Ini berarti mereka memiliki kepentingan terhadap hasil pendidikan dari lembaga tersebut, meskipun tidak secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaannya. (Muhaimin, 2010)

Ketiga pihak yang terlibat dalam pendidikan harus bekerja sama dan saling mendukung. Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pendidikan sangat bergantung pada keterlibatan dari ketiga stakeholder tersebut: sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Setelah dilakukan pemetaan terhadap stakeholder, komponen-komponen yang membentuk mereka akan teridentifikasi, sehingga stakeholder dapat menjadi kesatuan yang utuh dan saling berkolaborasi.

Peran stakeholder pendidikan

Dalam setiap komponen pendidikan memiliki peran yang berbeda untuk melaksanakan proses pendidikan mulai dari penentuan kebijakan pendidikan, implementasi kebijakan dan penggunaan lulusan.

- a. Peran orang tua sebagai stakeholder meliputi beberapa hal: mereka mendukung proses belajar-mengajar di sekolah, aktif dalam menyebarkan informasi tentang kegiatan sekolah di berbagai komunitas, siap menjadi narasumber berdasarkan keahlian dan profesi mereka, menyampaikan nilai-nilai positif dari kegiatan sekolah kepada masyarakat, dan berkolaborasi dengan anggota komite sekolah atau pihak lain dalam penyediaan sumber belajar.
- b. Peran guru sebagai stakeholder dalam pendidikan meliputi beberapa hal: mereka berkomunikasi secara rutin dengan keluarga, yakni orang tua atau wali, mengenai perkembangan dan prestasi anak-anak dalam belajar; mereka bekerja sama dengan masyarakat untuk mengidentifikasi anak-anak yang tidak bersekolah, mengajak mereka untuk masuk dan berpartisipasi di sekolah; menjelaskan kepada orang tua tujuan dan manfaat dari pendidikan sekolah bagi anak-anak mereka; mempersiapkan siswa agar bisa berinteraksi dengan masyarakat melalui kurikulum, seperti kunjungan ke museum atau memperingati hari-hari besar keagamaan dan nasional.
- c. Komite Sekolah adalah lembaga baru yang menggantikan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3). Fungsinya adalah sebagai wadah mandiri yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi manajemen pendidikan di setiap lembaga pendidikan, baik untuk pra sekolah, pendidikan formal di sekolah, maupun pendidikan di luar lingkungan sekolah (Kepmendiknas nomor: 044/U/2002). Dalam konteksnya, peran Komite Sekolah meliputi beberapa aspek: sebagai lembaga penasehat dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di lembaga pendidikan, sebagai pendukung baik dalam hal dukungan finansial, ide, maupun tenaga dalam menjalankan pendidikan di lembaga pendidikan, serta sebagai pengawas untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan dan hasil pendidikan di lembaga tersebut.
- d. Peran kepala sekolah sebagai stakeholder dalam pendidikan meliputi beberapa hal: mengelola hubungan antara sekolah dan orang tua siswa, menjaga hubungan yang baik dengan Komite Sekolah, serta menjalin dan memperluas kerjasama sekolah dengan lembaga-lembaga lain, baik yang berasal dari pemerintah maupun sektor swasta. Selain itu, kepala sekolah juga bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai peran dan fungsi sekolah melalui berbagai media komunikasi yang tersedia.
- e. Peran pemerintah dalam sektor pendidikan diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD). Melalui hasil amandemen Pasal 31 ayat 1-4, dinyatakan bahwa: setiap warga negara memiliki hak untuk menerima pendidikan, seluruh warga negara berkewajiban mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah bertanggung jawab untuk membiayainya. Pemerintah juga diwajibkan untuk mengembangkan dan menjalankan sistem pendidikan nasional yang bertujuan meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta moralitas yang baik untuk membentuk kecerdasan bangsa, yang diatur melalui perundang-undangan. Negara harus memberikan prioritas anggaran untuk pendidikan, minimal dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- f. Di samping masyarakat sukarela, ada sejumlah masyarakat yang melihat dunia pendidikan sebagai sumber manfaat. Ini termasuk penerbit buku, penyedia kursus, pengembang alat-alat pendidikan, dan pelaku usaha lainnya. Kelompok ini juga perlu didorong untuk menyadari bahwa pendidikan bukan hanya tentang mencari keuntungan, tetapi juga memerlukan kontribusi dan keterlibatan dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan. Pendekatan yang ideal terhadap dunia pendidikan dari

segi bisnis seharusnya bersifat mendukung, bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan finansial tanpa memperhatikan aspek kemanusiaan.(Mulyasa, 2002)

Tata kelola stakeholder pendidikan

Pengelolaan stakeholder di sebuah madrasah adalah usaha untuk melibatkan semua individu atau kelompok dengan kerjasama yang seimbang dan serasi di antara seluruh komunitas akademis madrasah, guna meningkatkan kualitas madrasah. Ini melibatkan kepemimpinan madrasah, staf pengajar, tenaga kependidikan, siswa, komite, dan pihak lainnya. Partisipasi dari stakeholder bertujuan untuk mengembangkan madrasah menjadi institusi pendidikan yang unggul (Kholis, dkk, 2014). Penyelenggaraan administrasi yang baik dan transparan merupakan syarat mutlak dan fondasi utama dalam usaha meningkatkan standar pendidikan di madrasah.(Kemenag, 2012) Penelitian tentang pengelolaan stakeholder di lingkungan sekolah masih terbatas, namun beberapa peneliti telah mengaitkan konsep mutu pendidikan dengan pengelolaan stakeholder sekolah. Menurut Kholis, dkk (2014), kepala sekolah berperan sebagai penggerak dalam pengembangan budaya sekolah yang berkualitas serta dalam mempromosikan partisipasi stakeholder. Ada dua aspek mutu yang tercakup dalam penelitian ini, yaitu dalam ranah akademik dan non-akademik. Tingkat partisipasi ini meliputi pimpinan, staf pengajar, staf kependidikan, siswa, komite sekolah, dan kelompok-kelompok kelas. Budaya mutu yang dikembangkan mencakup konsolidasi dan penggabungan sumber daya internal dan eksternal, menghubungkan sekolah dengan masyarakat, kolaborasi dengan berbagai pihak, restrukturisasi dan penyegaran peran komite sekolah, serta pembentukan budaya lingkungan yang bersih, menyenangkan, dan menunjang proses belajar-mengajar.(Kholis, 2014).

Menurut penelitian Latifah (2016), pengelolaan madrasah dalam perspektif Total Quality Management (TQM) telah berjalan efektif. Hal ini terlihat dari kualitas pengelolaan akademik dan administratif yang lebih superior. Strategi manajemen yang diterapkan melibatkan perencanaan, tindakan, organisasi sumber daya manusia, evaluasi hasil, dan pemberian arahan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu madrasah serta menghasilkan lulusan yang kompeten.(Latifah, 2016) Oleh karena itu, konsep mutu harus diinterpretasikan sebagai suatu usaha perbaikan dalam mengembangkan standar mutu. Isu mengenai mutu mencerminkan pandangan serta nilai-nilai filosofis dalam manajemen setiap lembaga, yang pada akhirnya membentuk landasan budaya mutu (Maryono, 2018). Untuk mengantisipasi dan merespons perubahan tersebut, diperlukan suatu pendekatan manajemen modern yang dikenal sebagai Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management). Gaspersz mengemukakan bahwa Total Quality Management (TQM) adalah suatu metode untuk terus meningkatkan kinerja secara berkesinambungan pada setiap tingkatan operasional dan proses, di semua fungsi organisasi, dengan memanfaatkan seluruh sumber daya manusia dan modal yang ada (Gaspersz, 2003). Manajemen mutu terpadu dianggap sebagai landasan filosofis dari perbaikan yang terus-menerus, memberikan kepada institusi pendidikan alat yang diperlukan untuk memenuhi dan bahkan melampaui keinginan, kebutuhan, dan harapan pelanggan, baik saat ini maupun di masa mendatang.(sallis, 1996) Peran kepala sekolah sangat krusial dalam penerapan Total Quality Management (TQM), terutama terkait dengan perubahan budaya organisasi, pengelolaan dari tingkat atas hingga bawah, orientasi pada kebutuhan konsumen, identifikasi hambatan dalam proses belajar, serta strategi untuk mengatasinya. Dua aspek penting terkait: pertama, pemenuhan kebutuhan staf baik di internal maupun eksternal lingkungan kerja; kedua, peningkatan sikap kerja yang didukung oleh latar belakang pendidikan dan budaya organisasi untuk mencapai keberhasilan dalam pekerjaan. Penyusunan personel dan struktur organisasi, penyampaian informasi yang akurat kepada konsumen, kemampuan dalam menganalisis serta menyelesaikan masalah, serta dinamika dalam perencanaan semuanya menjadi bagian yang erat terkait dengan peningkatan kualitas manajemen. Dalam penerapan manajemen mutu di madrasah, peran kepala sekolah sangat vital untuk mengkoordinasikan, menggerakkan, dan menyelaraskan semua sumber daya pendidikan yang tersedia. (El Widdah, M & Huda, 2018) Peran kepala sekolah/madrasah dapat difokuskan pada pengembangan potensi yang dimiliki oleh stakeholder, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Dengan memiliki visi dan misi yang jelas, kepala sekolah

mampu mengartikulasikan tujuan tersebut ke dalam langkah-langkah konkret dan tindakan nyata. Mereka mampu menginspirasi orang lain untuk bekerja bersama menuju pencapaian standar mutu sekolah yang tinggi. Kepala sekolah juga dapat menggerakkan semua unit dalam lingkungan sekolah, seperti bidang pengajaran dan kurikulum, sarana prasarana dan layanan siswa, serta hubungan masyarakat dan publikasi, juga bidang perencanaan dan keuangan. Tidak hanya unit-unit besar, tapi juga yang lebih kecil akan tergerak. Semua ini bertujuan untuk menghasilkan karya yang tidak hanya berkualitas lebih baik secara kuantitas, tetapi juga secara kualitas. (Kholis, 2014) Benar sekali, kajian terhadap tata kelola stakeholder di madrasah, khususnya fokus pada tenaga pendidik dan kependidikan, siswa, dan masyarakat mitra sangatlah penting. Ketiganya merupakan konsumen utama layanan pendidikan, sejalan dengan prinsip utama penerapan manajemen mutu terpadu yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan seluruh konsumen. Siswa menjadi konsumen utama yang secara langsung menerima layanan pendidikan, diikuti oleh orang tua sebagai konsumen kedua, dan pemerintah serta masyarakat sebagai konsumen ketiga. Guru, staf, dan setiap individu yang terlibat di madrasah adalah konsumen internal. Madrasah yang berkualitas adalah yang mampu menjalin hubungan baik dengan konsumennya dan memiliki fokus yang kuat pada peningkatan mutu. Oleh karena itu, kajian lebih lanjut terkait tata kelola stakeholder dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan menengah di madrasah perlu dilakukan sebagai langkah progresif menuju perbaikan yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Stakeholder adalah pemegang atau pemangku kepentingan. orang atau kelompok tertentu yang mempunyai kepentingan apa pun terhadap sebuah obyek disebut Stakeholder . Jadi Stakeholder pendidikan dapat diartikan sebagai orang yang menjadi pemegang dan sekaligus pemberi support terhadap pendidikan atau lembaga pendidikan. Dengan Perkataan lain Stakeholder adalah orang-orang atau badan yang berkepentingan langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan pendidikan di sekolah. Dalam manajemen sebuah pendidikan atau lembaga pendidikan Stakeholder adalah sebuah indikator untuk menentukan mutu dan atau layanan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan memiliki berbagai macam Stakeholder, maka dalam pemetaan atau pembagiannya akan dikenal Stakeholder primer, sekunder, dan tersier. Ketiga stakeholder pendidikan harus bersinergi dan mendukung satu sama lain. Dapat disimpulkan, keberhasilan pendidikan tidak akan terjadi tanpa keterlibatan ketiga stakeholder pendidikan: sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Setelah melakukan pemetaan terhadap stakeholder, maka akan ditemukan komponen-komponen penyusun sehingga stakeholder menjadi satu kesatuan utuh yang saling bersinergi. Bagi semua praktisi Pendidikan dan pemangku kepentingan, agar memperhatikan semua aspek penerapan pengelolaan stakeholder Pendidikan, sehingga akan memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akdon. (2009). *Strategic Management For Education Management (Manajemen Strategik untuk Manajemen Pendidikan)*. Alfabeta.
- El Widdah, M & Huda, S. (2018). *Manajemen Strategi Peningkatan Mutu Madrasah*. Selim Media Indonesia.
- Fattah, N. (2009). *Landasan Manajemen Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Kemenag. (2012). *Standar Dokumen Administrasi Madrasah*. UPPAM.
- Kholis. (2014). *Mutu Sekolah dan Budaya Partisipasi Stakeholders*.
- Latifah. (2016). *Pengelolaan Madrasah dalam Perspektif Total Quality Management*.
- Muhaimin, D. (2010). *Manajemen Pendidikan aplikasinya dalam Penyusunan Pengembangan Sekolah/Madrasah*. Prenada Media Group.
- Mulyasa. (2002). *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep Strategi dan Implementasi*. Remaja Rosda karya.
- sallis, E. (1996). *Total Quality Management in Education*. Philadelphia Kogan Page Limited.